MJPA : Musamus Journal of Public Administration
Volume 9. No. 1. (Oktober, 2026), hlm 124 - 139
eISSN/pISSN:2622917X/26226499

Evaluasi Program Bantuan Dana Sosial Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Merauke

Yuni Arniko Eko Sujava[1*]; Yohanis E Teturan[2]; Ransta L Lekatompessy[3]

[123] Administrasi Publik Universitas Musamus, Merauke, Indonesia ;
* yuniarnikoekosujava@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Dana Sosial kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Merauke. Program ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat permodalan, dan mendorong kesejahteraan pelaku UMKM, namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan model evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek konteks program memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pelaku UMKM dalam mengatasi keterbatasan modal usaha. Pada aspek input, program didukung oleh anggaran, sumber daya manusia, dan regulasi, meskipun masih terdapat keterbatasan jumlah pendamping dan cakupan anggaran. Pada aspek proses, pelaksanaan program telah mengikuti tahapan pendataan, verifikasi, penyaluran, serta monitoring dan evaluasi, namun masih menghadapi kendala berupa keterlambatan penyampaian informasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan sinkronisasi data penerima. Pada aspek produk, program memberikan dampak positif terhadap peningkatan modal usaha, kapasitas produksi, dan pendapatan penerima bantuan, meskipun tingkat keberhasilannya berbeda sesuai kemampuan pengelolaan usaha masing-masing. Faktor yang memengaruhi keberhasilan program meliputi ketepatan sasaran, kualitas pendataan UMKM, efektivitas pengawasan, koordinasi antarinstansi, kemampuan pengelolaan usaha, serta dukungan regulasi dan pendampingan. Secara keseluruhan, program telah memberikan manfaat nyata bagi UMKM di Kabupaten Merauke, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pendampingan, koordinasi, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha agar pelaksanaannya lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: *evaluasi program, bantuan dana sosial*

Abstract

This study aims to evaluate the Social Assistance Program for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) implemented by the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and Micro, Small, and Medium Enterprises of Merauke Regency. The program was designed to strengthen business capital, improve business productivity, and enhance the welfare of MSME actors. However, several challenges have affected its implementation and overall effectiveness. This research employed a qualitative approach using the Context, Input, Process, Product (CIPP) evaluation model. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, and were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that, in terms of context, the program was highly relevant to the needs of MSMEs, particularly in addressing capital constraints and supporting business sustainability. Regarding input, the program was supported by adequate

funding, human resources, and regulatory frameworks, although the limited number of facilitators and budget coverage remained significant challenges. From the process perspective, the program was implemented systematically through beneficiary identification, verification, fund distribution, monitoring, and evaluation, despite encountering obstacles such as delayed information dissemination, limited human resources, and data synchronization issues. In terms of product, the program contributed positively to increased business capital, production capacity, and beneficiaries' income, although the level of success varied depending on business management capabilities. Overall, the program has provided tangible benefits to MSMEs in Merauke Regency; however, strengthening mentoring, inter-agency coordination, and entrepreneurs' capacity-building is essential to ensure more effective and sustainable program implementation.
Keywords: *program evaluation, social assistance*

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. UMKM berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, serta memperkuat ketahanan ekonomi, terutama pada saat terjadi krisis ekonomi. Menurut Tambunan (2020), UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja dan memiliki daya tahan yang relatif tinggi dibandingkan usaha berskala besar. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pentingnya pengembangan UMKM ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Kedua regulasi tersebut menempatkan UMKM sebagai sektor strategis yang perlu memperoleh dukungan melalui kebijakan pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, kemudahan akses pasar, serta penguatan kelembagaan. Di tingkat daerah, pelaksanaan pemberian bantuan sosial mengacu pada Peraturan Bupati Merauke Nomor 97 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Merauke dalam menyalurkan bantuan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melaksanakan Program Bantuan Dana Sosial kepada UMKM sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini bertujuan membantu pelaku UMKM mengatasi keterbatasan modal usaha, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kesempatan usaha, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke (2024), jumlah UMKM yang terdaftar mencapai 6.717 unit usaha. Pada tahun yang sama, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dana sosial kepada 150 kelompok usaha dengan nilai bantuan berkisar antara Rp10.000.000 hingga Rp40.000.000 per kelompok usaha. Selain itu, selama periode 2023–2025 pemerintah terus meningkatkan dukungan melalui bantuan permodalan, penyediaan sarana usaha, pendampingan, serta pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai sumber pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Meskipun demikian, besarnya alokasi anggaran dan meningkatnya jumlah penerima bantuan belum secara otomatis menunjukkan bahwa program telah berjalan secara efektif. Masih terdapat berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi keberhasilan program, antara lain ketepatan sasaran penerima bantuan, validitas data UMKM, efektivitas pemanfaatan dana oleh penerima manfaat, keterbatasan pendampingan usaha, koordinasi antarinstansi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga oleh kualitas implementasi program dan dampaknya terhadap perkembangan usaha penerima manfaat.

Dalam perspektif evaluasi kebijakan publik, suatu program perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan program telah tercapai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan Model Evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP) yang dikembangkan oleh Stufflebeam sebagai kerangka analisis utama. Model CIPP memandang evaluasi sebagai proses sistematis yang menilai kesesuaian konteks program, kecukupan sumber daya, kualitas pelaksanaan, dan hasil yang dicapai sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas suatu program.

Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh Good Governance Theory yang menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan program publik. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program bantuan modal memiliki kontribusi positif terhadap perkembangan UMKM, namun masih menghadapi berbagai tantangan implementasi. Girsang dan Purnama (2023) menemukan bahwa Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) mampu meningkatkan perkembangan usaha mikro, sedangkan Hartarto (2024) menyimpulkan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh kecukupan bantuan dan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dana yang diterima.

Putra et al. (2021) menekankan pentingnya pendampingan dan pengawasan dalam meningkatkan efektivitas bantuan modal, sementara Nabila (2021) serta Haryati et al. (2026) mengidentifikasi berbagai kendala dalam validasi data penerima dan ketepatan sasaran program. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada evaluasi Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebagai kebijakan pemerintah pusat sehingga belum banyak mengkaji program bantuan dana sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Merauke.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Pertama, penelitian mengenai evaluasi program bantuan dana sosial UMKM yang dikelola oleh pemerintah daerah di wilayah Papua Selatan masih sangat terbatas. Kedua, penelitian sebelumnya umumnya hanya menilai efektivitas program, sedangkan penelitian ini menggunakan Model Evaluasi CIPP sehingga mampu mengevaluasi program secara komprehensif mulai dari aspek konteks, input, proses, hingga produk. Ketiga, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tingkat keberhasilan program, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Merauke.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Dana Sosial kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kabupaten Merauke menggunakan Model Evaluasi CIPP serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian evaluasi kebijakan publik, khususnya pada bidang pemberdayaan UMKM, sekaligus menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Merauke dalam meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan program bantuan dana sosial kepada UMKM.

Metode/Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan Program Bantuan Dana Sosial kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke. Subjek penelitian terdiri atas 15 informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Kepala Dinas (1 orang), Kepala Bidang (1 orang), pendamping program (3 orang), dan penerima bantuan UMKM (10 orang). Objek penelitian dibatasi pada evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Dana Sosial kepada UMKM selama periode 2023–2025 menggunakan model Context, Input, Process, Product (CIPP) dari Stufflebeam. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi, serta data sekunder yang berasal dari dokumen resmi, laporan pelaksanaan program, data penerima bantuan, dokumen monitoring dan evaluasi, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan penelitian (Sugiyono, 2019).

Hasil dan Pembahasan

1. Evaluasi Program Bantuan Dana Sosial kepada UMKM dengan Model CIPP

a. Evaluasi Konteks

Program Bantuan Dana Sosial kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Merauke dilaksanakan sebagai salah satu instrumen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui penguatan permodalan usaha. Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi pada aspek context menunjukkan bahwa program memiliki tingkat relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan pelaku UMKM. Seluruh informan menyatakan bahwa keterbatasan modal masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi dalam mengembangkan usaha sehingga bantuan pemerintah dipandang sebagai bentuk intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih mengalami kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan maupun skala usaha. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar pelaku usaha mengandalkan modal pribadi yang relatif terbatas sehingga perkembangan usaha menjadi lambat. Program bantuan dana sosial dipandang mampu memberikan tambahan modal awal untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas produksi, serta menjaga keberlangsungan usaha.

Tabel 1. Matriks Coding Evaluasi Context

Tema	Kode	Frekuensi Informan	Persentase
Kebutuhan modal usaha	CT-01	15	100%
Relevansi program	CT-02	15	100%
Dukungan pemerintah	CT-03	14	93,3%
Keberlanjutan usaha	CT-04	13	86,7%

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026)

Matriks coding menunjukkan bahwa kebutuhan modal usaha dan relevansi program merupakan tema yang paling dominan muncul selama proses wawancara. Seluruh informan menyatakan bahwa bantuan modal masih menjadi kebutuhan utama bagi pelaku UMKM. Sementara itu, tema keberlanjutan usaha memperoleh frekuensi yang sedikit lebih rendah karena tidak seluruh penerima bantuan memiliki kemampuan yang sama dalam mengembangkan usahanya setelah memperoleh bantuan. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Dinas yang menyatakan bahwa program bantuan dana sosial dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan.

> "Program bantuan dana sosial diberikan untuk membantu pelaku UMKM yang mengalami keterbatasan modal sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya." (Wawancara dengan Informan EYBR, 5 Februari 2026).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Bidang yang menjelaskan bahwa proses penetapan penerima bantuan didasarkan pada hasil pendataan dan verifikasi lapangan sehingga bantuan dapat diberikan kepada pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan.

> "Program ini diarahkan kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dan memiliki kebutuhan riil terhadap tambahan modal usaha." (Wawancara dengan Informan PH, 5 Februari 2026).

Hal senada disampaikan oleh salah seorang pendamping UMKM yang menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha yang didampingi mengalami keterbatasan modal sehingga bantuan pemerintah memberikan dorongan terhadap keberlangsungan usaha mereka.

> "Sebagian besar UMKM yang kami dampingi memang membutuhkan tambahan modal agar usahanya dapat berkembang dan tetap berjalan." (Wawancara dengan Informan RS, 9 Februari 2026).

Selain didukung oleh hasil wawancara, temuan penelitian juga diperkuat oleh data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke yang menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 6.717 UMKM yang terdaftar, sedangkan jumlah penerima Program Bantuan Dana Sosial hanya 150 kelompok usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap bantuan modal masih jauh lebih besar dibandingkan kapasitas program yang dapat dibiayai pemerintah daerah.

Menurut Stufflebeam (2007), evaluasi konteks bertujuan mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, serta peluang yang menjadi dasar penyusunan suatu program. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Program Bantuan Dana Sosial kepada UMKM telah memenuhi dimensi tersebut karena dirancang berdasarkan kebutuhan nyata pelaku usaha, yaitu keterbatasan modal usaha. Dengan demikian, tujuan program telah sesuai dengan kondisi empiris yang dihadapi masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Dari perspektif Good Governance Theory, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan prinsip responsiveness, yaitu kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat melalui kebijakan publik yang relevan. Bantuan modal yang diberikan merupakan bentuk pelayanan publik yang berorientasi pada penyelesaian masalah ekonomi masyarakat. Selain itu, proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan mencerminkan upaya pemerintah dalam menerapkan prinsip efektivitas dan akuntabilitas agar bantuan tepat sasaran.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Girsang dan Purnama (2023) yang menyatakan bahwa bantuan modal usaha mampu meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam mempertahankan kegiatan usahanya. Penelitian Hartarto (2024) juga menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas UMKM. Hasil penelitian ini turut mendukung temuan Putra et al. (2021) yang menegaskan bahwa keberhasilan program bantuan modal sangat dipengaruhi oleh kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat sasaran.

Berdasarkan hasil evaluasi konteks dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Dana Sosial kepada UMKM di Kabupaten Merauke memiliki tingkat relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, keterbatasan kapasitas anggaran menyebabkan cakupan penerima bantuan masih relatif kecil dibandingkan jumlah UMKM yang ada. Oleh karena itu, peningkatan alokasi anggaran dan perluasan jangkauan program menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan pada periode berikutnya.

b. Input Evaluation (Evaluasi Input)

Evaluasi input bertujuan untuk menilai kesiapan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan Program Bantuan Dana Sosial kepada UMKM di Kabupaten Merauke. Berdasarkan hasil penelitian, aspek input meliputi ketersediaan anggaran, sumber daya manusia (SDM), regulasi, sarana pendukung, serta mekanisme pelaksanaan program. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah didukung oleh sumber daya yang memadai, namun masih terdapat beberapa keterbatasan yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program bantuan dana sosial. Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagian pembiayaan program juga berasal dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) sehingga mampu memperluas jangkauan bantuan kepada pelaku UMKM.

Tabel 2. Matriks Coding Evaluasi Input

Tema	Kode	Frekuensi Informan	Persentase
Dukungan anggaran	IN-01	15	100%
Ketersediaan regulasi	IN-02	15	100%

Ketersediaan SDM	IN-03	12	80,0%
Pendampingan UMKM	IN-04	14	93,3%
Keterbatasan jumlah pendamping	IN-05	13	86,7%

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026)

Hasil coding menunjukkan bahwa dukungan anggaran dan regulasi merupakan aspek yang paling banyak disampaikan oleh informan. Seluruh informan menyatakan bahwa program telah memiliki dasar hukum dan dukungan pendanaan yang memadai. Namun demikian, sebagian besar informan juga mengemukakan bahwa jumlah pendamping yang tersedia belum sebanding dengan banyaknya kelompok UMKM yang harus dibina. Kepala Dinas menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Merauke.

> "Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Dana Sosial kepada UMKM sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat." (Wawancara dengan Informan EYBR, 5 Februari 2026).

Kepala Bidang juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program telah didukung oleh regulasi dan mekanisme yang jelas sehingga proses penyaluran bantuan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

> "Program dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga setiap tahapan mulai dari pendataan, verifikasi, hingga penyaluran memiliki pedoman yang jelas." (Wawancara dengan Informan PH, 5 Februari 2026).

Meskipun demikian, para pendamping mengakui bahwa keterbatasan jumlah SDM masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program.

> "Jumlah pendamping masih terbatas sehingga kami harus mendampingi cukup banyak kelompok usaha dalam waktu yang bersamaan." (Wawancara dengan Informan W, 9 Februari 2026).

Informan lain juga menambahkan bahwa keterbatasan pendamping menyebabkan intensitas pembinaan belum dapat dilakukan secara maksimal.

> "Kami berusaha melakukan pendampingan secara berkala, tetapi karena jumlah penerima cukup banyak, tidak semua kelompok dapat dikunjungi sesering yang diharapkan." (Wawancara dengan Informan RS, 9 Februari 2026).

Selain itu, sebagian penerima bantuan menyampaikan bahwa mereka masih memerlukan pelatihan manajemen usaha dan pengelolaan keuangan setelah menerima bantuan modal agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Menurut Stufflebeam (2007), evaluasi input berfungsi untuk menilai kecukupan sumber daya, strategi, serta kemampuan organisasi dalam mendukung pencapaian tujuan program. Berdasarkan hasil penelitian, Program Bantuan Dana Sosial kepada UMKM telah memiliki dukungan sumber daya yang relatif memadai, terutama dari aspek pendanaan, regulasi, dan mekanisme pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan prasyarat dasar yang diperlukan untuk mendukung implementasi program.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan jumlah pendamping menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembinaan, monitoring, dan evaluasi belum dapat dilakukan secara

optimal kepada seluruh penerima bantuan. Dengan demikian, kesiapan sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan agar efektivitas program dapat tercapai secara maksimal. Ditinjau dari perspektif Good Governance Theory, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui penyediaan regulasi dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Selain itu, dukungan anggaran mencerminkan adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik melalui pemberdayaan UMKM. Akan tetapi, prinsip efektivitas belum sepenuhnya tercapai karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia masih memengaruhi kualitas pendampingan kepada penerima bantuan.

Berdasarkan hasil evaluasi input, dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Dana Sosial kepada UMKM di Kabupaten Merauke telah memiliki dukungan anggaran, regulasi, dan mekanisme pelaksanaan yang memadai. Namun demikian, peningkatan jumlah pendamping, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyelenggaraan pelatihan secara berkelanjutan masih diperlukan agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

c. Process Evaluation (Evaluasi Proses)

Evaluasi process bertujuan untuk menilai pelaksanaan Program Bantuan Dana Sosial kepada UMKM mulai dari tahap pendataan, verifikasi, penetapan penerima, penyaluran bantuan, hingga monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum seluruh tahapan pelaksanaan program telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Merauke. Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala yang masih memengaruhi efektivitas pelaksanaan program, terutama berkaitan dengan keterlambatan informasi, keterbatasan sumber daya manusia, sinkronisasi data penerima, dan intensitas pendampingan pasca penyaluran bantuan.

Hasil analisis wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan menyatakan proses pendataan dan verifikasi dilakukan sebelum penetapan penerima bantuan. Tahapan tersebut bertujuan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki usaha yang masih aktif. Setelah proses verifikasi selesai, bantuan disalurkan kepada kelompok penerima yang telah ditetapkan, kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi oleh dinas bersama pendamping UMKM.

Tabel 3. Matriks Coding Evaluasi Process

Tema	Kode	Frekuensi Informan	Persentase
Pendataan penerima	PR-01	15	100%
Verifikasi lapangan	PR-02	15	100%
Penyaluran bantuan	PR-03	15	100%
Monitoring dan evaluasi	PR-04	15	100%
Pengawasan program	PR-05	15	100%
Keterlambatan informasi	PR-06	10	66,7%

Sinkronisasi data	PR-07	11	73,3%
Keterbatasan SDM	PR-08	12	80,0%
Tema	Kode	Frekuensi Informan	Persentase

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026)

Berdasarkan matriks coding tersebut, seluruh informan menyatakan bahwa pelaksanaan program telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Akan tetapi, beberapa informan mengemukakan bahwa keterbatasan jumlah pendamping dan belum optimalnya sinkronisasi data menyebabkan proses monitoring belum dapat dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh penerima bantuan.

Kepala Bidang menjelaskan bahwa pengawasan merupakan bagian penting dalam memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai tujuan program.

> "Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui monitoring lapangan, pemeriksaan laporan penerima bantuan, serta koordinasi dengan pendamping UMKM untuk mengetahui perkembangan usaha penerima." (Wawancara dengan Informan PH, 5 Februari 2026).

Beliau juga menegaskan bahwa monitoring dilakukan agar bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha.

> "Kami melakukan pemantauan terhadap penggunaan bantuan agar dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan usaha." (Wawancara dengan Informan PH, 5 Februari 2026).

Selain itu, Kepala Bidang menyampaikan bahwa pengawasan berfungsi sebagai upaya preventif untuk meminimalkan penyimpangan dalam penggunaan bantuan.

> "Dengan adanya pengawasan, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan program dapat berjalan lebih efektif dalam mencapai tujuannya." (Wawancara dengan Informan PH, 5 Februari 2026).

Hasil wawancara dengan pendamping UMKM menunjukkan bahwa monitoring dilakukan secara berkala melalui kunjungan lapangan dan komunikasi langsung dengan penerima bantuan. Pendamping tidak hanya memantau penggunaan dana, tetapi juga memberikan arahan apabila penerima mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya. Sebagaimana disampaikan oleh Informan RS:

> "Sebagai pendamping, kami melakukan kunjungan kepada penerima bantuan untuk melihat secara langsung penggunaan bantuan dan perkembangan usaha yang dijalankan." (Wawancara dengan Informan RS, 9 Februari 2026).

Selanjutnya Informan W menjelaskan bahwa monitoring juga menjadi media untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM.

> "Pengawasan dilakukan secara berkala melalui kunjungan lapangan dan komunikasi dengan pelaku UMKM agar bantuan digunakan sesuai tujuan program." (Wawancara dengan Informan W, 9 Februari 2026).
>
> "Melalui pengawasan, berbagai kendala yang dihadapi penerima dapat diketahui lebih cepat dan segera diberikan solusi." (Wawancara dengan Informan W, 9 Februari 2026).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian penerima bantuan mengharapkan frekuensi pendampingan yang lebih intensif, terutama setelah bantuan diterima. Menurut mereka, pendampingan yang berkelanjutan akan membantu meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha sehingga bantuan yang diterima dapat memberikan dampak yang lebih optimal.

Menurut Stufflebeam (2007), evaluasi process dilakukan untuk menilai apakah suatu program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Bantuan Dana Sosial kepada UMKM telah mengikuti tahapan yang sistematis, mulai dari pendataan, verifikasi, penetapan penerima, penyaluran bantuan, hingga monitoring dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural implementasi program telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas proses pelaksanaan masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, yaitu keterbatasan jumlah pendamping, keterlambatan penyampaian informasi, dan sinkronisasi data penerima bantuan. Kendala tersebut menyebabkan intensitas monitoring dan pembinaan belum dapat dilakukan secara optimal kepada seluruh kelompok penerima bantuan. Dengan demikian, aspek proses masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif Good Governance Theory, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring dan pengawasan merupakan implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan program publik. Monitoring lapangan, pemeriksaan laporan penerima bantuan, serta koordinasi antara dinas dan pendamping menunjukkan adanya mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai dengan tujuan program. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia menunjukkan bahwa prinsip efektivitas belum sepenuhnya tercapai sehingga diperlukan peningkatan kapasitas organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi process, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Dana Sosial kepada UMKM di Kabupaten Merauke telah berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Namun demikian, peningkatan kualitas monitoring, penguatan koordinasi antarinstansi, pemutakhiran data penerima, serta penambahan jumlah pendamping masih diperlukan agar proses implementasi program dapat berlangsung lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

d. Product Evaluation (Evaluasi Produk)

Evaluasi product bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Program Bantuan Dana Sosial kepada UMKM memberikan manfaat dan dampak terhadap perkembangan usaha penerima bantuan di Kabupaten Merauke. Berdasarkan hasil penelitian, program secara umum memberikan dampak positif terhadap peningkatan modal usaha, kapasitas produksi, pendapatan, dan keberlangsungan usaha penerima bantuan. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan program menunjukkan variasi antar penerima karena dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan usaha, pengalaman berwirausaha, serta intensitas pendampingan yang diterima.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh penerima bantuan menyatakan bahwa bantuan modal yang diberikan mampu meningkatkan kemampuan mereka dalam menyediakan bahan baku, menambah peralatan usaha, dan memperluas kegiatan produksi. Sebagian besar informan juga mengakui bahwa bantuan tersebut berdampak terhadap peningkatan pendapatan, walaupun besarnya peningkatan berbeda pada masing-masing pelaku usaha.

Tabel 4. Matriks Coding Evaluasi Product

Tema	Kode	Frekuensi Informan	Persentase
Peningkatan modal usaha	PD-01	15	100%
Peningkatan kapasitas produksi	PD-02	14	93,3%
Peningkatan pendapatan	PD-03	13	86,7%
Keberlanjutan usaha	PD-04	12	80,0%
Pengembangan usaha	PD-05	13	86,7%

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026)

Matriks coding menunjukkan bahwa peningkatan modal usaha merupakan dampak yang paling banyak dirasakan oleh penerima bantuan. Sebagian besar informan menyatakan bahwa tambahan modal memungkinkan mereka membeli bahan baku, memperbaiki sarana produksi, dan meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan. Dampak lanjutan yang dirasakan adalah meningkatnya omzet dan kemampuan usaha untuk tetap beroperasi.

Salah seorang penerima bantuan menyampaikan bahwa bantuan pemerintah memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap perkembangan usahanya.

"Setelah menerima bantuan, saya dapat menambah stok barang sehingga penjualan menjadi lebih meningkat dibandingkan sebelumnya." (Wawancara dengan Informan Penerima Bantuan, Februari 2026).

Informan lain menjelaskan bahwa bantuan modal tidak hanya meningkatkan kapasitas usaha, tetapi juga memberikan rasa percaya diri untuk mengembangkan usaha secara lebih serius.

"Bantuan ini sangat membantu karena kami dapat membeli peralatan yang sebelumnya belum mampu kami beli sehingga usaha menjadi lebih berkembang." (Wawancara dengan Informan Penerima Bantuan, Februari 2026).

Selain itu, salah seorang pendamping UMKM menyampaikan bahwa sebagian besar kelompok penerima mengalami perkembangan usaha setelah memperoleh bantuan, meskipun terdapat beberapa kelompok yang masih membutuhkan pembinaan lebih lanjut.

"Mayoritas penerima bantuan menunjukkan perkembangan usaha yang cukup baik, namun masih ada beberapa kelompok yang memerlukan pendampingan dalam mengelola modal usahanya." (Wawancara dengan Informan Pendamping, Februari 2026).

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peningkatan modal usaha terlihat dari bertambahnya jumlah bahan baku, peralatan produksi, serta variasi produk yang dipasarkan oleh penerima bantuan. Akan tetapi, penelitian juga menemukan bahwa tidak seluruh penerima mampu memanfaatkan bantuan secara optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam kemampuan manajemen usaha dan pemasaran produk.

Tabel 5. Dampak Program Bantuan Dana Sosial terhadap UMKM

Indikator	Kondisi Sebelum Bantuan	Kondisi Setelah Bantuan
Modal usaha	Terbatas	Meningkat
Kapasitas produksi	Rendah	Meningkat
Pendapatan usaha	Belum stabil	Cenderung meningkat
Variasi produk	Terbatas	Lebih beragam
Keberlanjutan usaha	Rentan	Lebih stabil

Sumber: Hasil observasi dan wawancara peneliti (2026).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum Program Bantuan Dana Sosial memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Merauke. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya merata karena dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing pelaku usaha.

Menurut Stufflebeam (2007), evaluasi product berfokus pada penilaian terhadap hasil akhir dan manfaat yang dihasilkan oleh suatu program. Berdasarkan hasil penelitian, Program Bantuan Dana Sosial kepada UMKM telah menghasilkan dampak positif berupa peningkatan modal usaha, kapasitas produksi, dan pendapatan penerima bantuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama program dalam meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku UMKM telah tercapai.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan program belum sepenuhnya seragam pada seluruh penerima bantuan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan usaha, pengalaman berwirausaha, akses pasar, dan intensitas pendampingan yang diterima setelah bantuan disalurkan. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh kemampuan penerima dalam memanfaatkan bantuan tersebut secara produktif.

Dalam perspektif Good Governance Theory, hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah memberikan public value melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Program bantuan modal merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, prinsip effectiveness dan efficiency akan lebih optimal apabila pemerintah daerah memperkuat sistem pendampingan, pelatihan kewirausahaan, dan evaluasi pasca penyaluran bantuan sehingga manfaat program dapat berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi product, dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Dana Sosial kepada UMKM telah memberikan manfaat nyata bagi penerima bantuan, terutama dalam meningkatkan modal usaha, kapasitas produksi, dan pendapatan. Namun demikian, untuk meningkatkan keberlanjutan dampak program, pemerintah daerah perlu memperkuat pendampingan usaha, pelatihan manajemen, akses pemasaran, dan monitoring pasca penyaluran bantuan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Bantuan Dana Sosial kepada UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Program Bantuan Dana Sosial kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Merauke tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan sintesis hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis menggunakan Model CIPP, penelitian ini mengidentifikasi enam faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi program, yaitu ketepatan sasaran penerima bantuan, kualitas pendataan UMKM, efektivitas pengawasan, koordinasi antarinstansi, kemampuan pengelolaan usaha oleh pelaku UMKM, serta dukungan regulasi dan pendampingan pemerintah daerah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program pemberdayaan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh aspek produk (product) berupa bantuan modal, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas proses implementasi, kesiapan sumber daya, dan tata kelola program secara menyeluruh.

Tabel 6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Bantuan Dana Sosial kepada UMKM

Faktor	Temuan Penelitian	Tingkat Pengaruh
Ketepatan sasaran penerima	Bantuan diterima oleh UMKM yang memenuhi kriteria	Sangat Tinggi
Kualitas pendataan UMKM	Menentukan validitas penerima bantuan	Tinggi
Efektivitas pengawasan	Mencegah penyalahgunaan bantuan	Tinggi
Koordinasi antarinstansi	Memperlancar pelaksanaan program	Tinggi
Kemampuan pengelolaan usaha	Menentukan perkembangan usaha penerima	Sangat Tinggi
Regulasi dan pendampingan	Mendukung keberlanjutan program	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026)

Berdasarkan matriks tersebut, ketepatan sasaran penerima bantuan menjadi faktor pertama yang menentukan keberhasilan program. Seluruh informan menyatakan bahwa bantuan harus diberikan kepada pelaku UMKM yang benar-benar aktif menjalankan usaha dan memenuhi persyaratan administrasi. Ketidaktepatan sasaran akan menyebabkan manfaat program tidak tercapai secara optimal. Faktor kedua adalah kualitas pendataan UMKM. Penelitian menemukan bahwa data UMKM yang akurat menjadi dasar dalam menentukan penerima bantuan. Apabila data belum diperbarui secara berkala, maka potensi kesalahan dalam penetapan penerima bantuan akan semakin besar. Faktor ketiga adalah efektivitas pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa monitoring lapangan dan evaluasi berkala berperan penting dalam memastikan bantuan digunakan sesuai tujuan program. Pengawasan juga menjadi sarana untuk mengetahui perkembangan usaha penerima bantuan dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program. Faktor

keempat adalah koordinasi antarinstansi. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, pendamping lapangan, pemerintah distrik, serta pemerintah kampung berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program. Koordinasi yang baik mempermudah proses pendataan, verifikasi, penyaluran, hingga monitoring penerima bantuan.

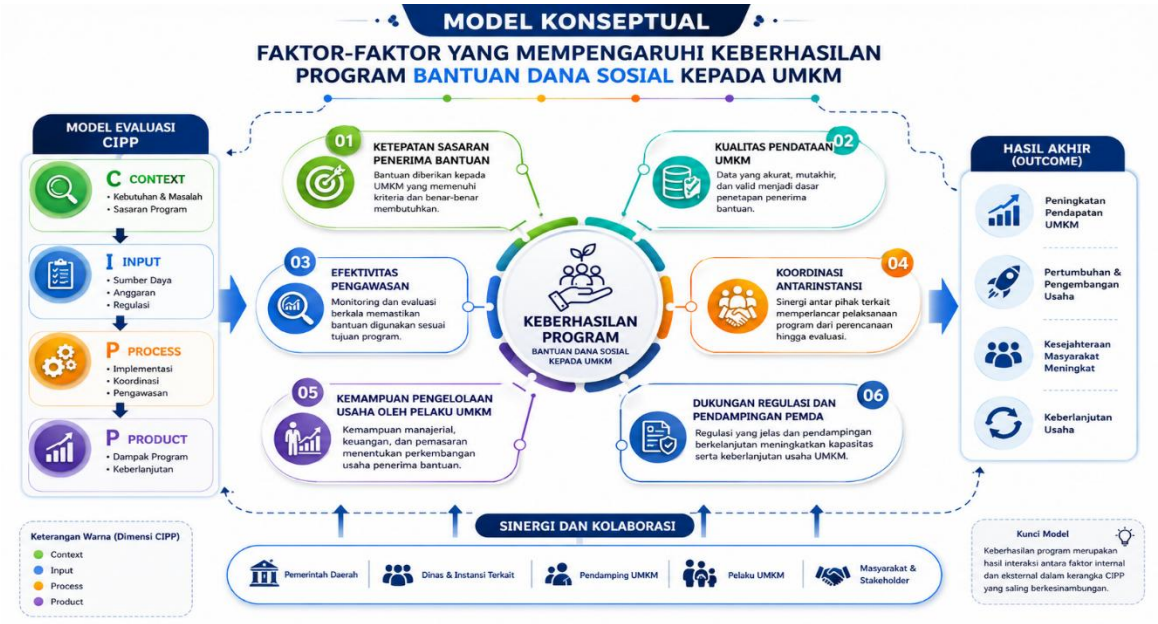
Penelitian ini menemukan bahwa kemampuan pengelolaan usaha oleh pelaku UMKM merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan program. Meskipun seluruh penerima memperoleh bantuan modal, perkembangan usaha yang dicapai menunjukkan variasi. Pelaku usaha yang memiliki kemampuan mengelola keuangan, menyusun perencanaan usaha, dan melakukan pemasaran secara efektif cenderung memperoleh perkembangan usaha yang lebih baik dibandingkan penerima yang belum memiliki kemampuan tersebut.

Faktor terakhir adalah dukungan regulasi dan pendampingan pemerintah daerah. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi memberikan kepastian dalam pelaksanaan program, sedangkan pendampingan berfungsi meningkatkan kapasitas penerima bantuan agar mampu memanfaatkan bantuan secara produktif. Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan membantu pelaku UMKM mengatasi berbagai kendala teknis, administrasi, maupun pemasaran yang dihadapi selama menjalankan usaha.

Berdasarkan sintesis hasil penelitian, keenam faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang menentukan keberhasilan Program Bantuan Dana Sosial kepada UMKM. Dalam perspektif Model CIPP, faktor ketepatan sasaran dan kualitas pendataan berkaitan dengan dimensi context, karena menjadi dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menentukan kelompok sasaran program. Dukungan regulasi, anggaran, dan pendampingan mencerminkan dimensi input, sedangkan koordinasi antarinstansi dan efektivitas pengawasan merupakan bagian dari dimensi process yang menentukan kualitas implementasi program. Adapun kemampuan pengelolaan usaha oleh penerima bantuan tercermin pada dimensi product, yaitu hasil nyata yang diperoleh setelah program dilaksanakan.

Ditinjau dari Good Governance Theory, enam faktor tersebut menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ketepatan sasaran dan kualitas pendataan mencerminkan prinsip akuntabilitas, karena pemerintah bertanggung jawab memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang memenuhi kriteria. Efektivitas pengawasan menunjukkan implementasi prinsip transparansi dan pengendalian, sedangkan koordinasi antarinstansi menggambarkan pentingnya kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dukungan regulasi mencerminkan prinsip kepastian hukum (rule of law), sementara pendampingan pemerintah daerah merupakan bentuk responsivitas dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan dalam mengelola seluruh tahapan program. Penjelasan tentang Model Konseptual sebagai berikut pada gambar 1:

Gambar. 1 Model Konseptual



Sumber :Hasil Olahan Peneliti (2026)

Berdasarkan hasil sintesis penelitian, model konseptual pada Gambar 1 menunjukkan bahwa keberhasilan Program Bantuan Dana Sosial kepada UMKM merupakan hasil interaksi antara empat dimensi evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dengan enam faktor utama, yaitu ketepatan sasaran penerima bantuan, kualitas pendataan UMKM, efektivitas pengawasan, koordinasi antarinstansi, kemampuan pengelolaan usaha oleh pelaku UMKM, serta dukungan regulasi dan pendampingan pemerintah daerah. Keenam faktor tersebut saling berkaitan dalam membentuk efektivitas implementasi program dan berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas UMKM serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Merauke.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Dana Sosial kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke secara umum telah berjalan cukup efektif berdasarkan empat dimensi evaluasi Context, Input, Process, dan Product (CIPP). Program memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pelaku UMKM dalam mengatasi keterbatasan modal usaha, didukung oleh anggaran, regulasi, dan mekanisme pelaksanaan yang memadai, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan modal usaha, kapasitas produksi, pendapatan, dan keberlanjutan usaha penerima bantuan. Meskipun demikian, efektivitas program masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah pendamping, kualitas pendataan UMKM, koordinasi antarinstansi, efektivitas pengawasan, serta kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usahanya. Penelitian ini juga mengidentifikasi enam faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi program, yaitu ketepatan sasaran penerima bantuan, kualitas pendataan UMKM, efektivitas pengawasan, koordinasi antarinstansi, kemampuan pengelolaan usaha, serta dukungan regulasi dan pendampingan pemerintah daerah. Temuan tersebut memperkuat bahwa keberhasilan program tidak hanya

ditentukan oleh besarnya bantuan modal, tetapi juga oleh kualitas tata kelola program yang mencerminkan prinsip-prinsip Good Governance. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat sistem pendataan UMKM secara berkala, meningkatkan kapasitas dan jumlah pendamping, mengoptimalkan koordinasi antarinstansi, memperkuat monitoring dan evaluasi, serta menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha dan akses pemasaran secara berkelanjutan agar efektivitas program semakin meningkat, tepat sasaran, dan mampu mendorong kemandirian serta daya saing UMKM di Kabupaten Merauke.

Referensi

Bovaird, T., & Löffler, E. (2016). Public management and governance (3rd ed.). Routledge.

Basri, Y. M., Findayani, T. I., & Zarefar, A. (2021). Implementation of good governance to improve the performance of village governments. Jurnal Akuntansi, 11(2), 123–136.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.

Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.

Girsang, R., & Purnama, A. (2023). Evaluasi implementasi program pemberdayaan UMKM melalui bantuan pemerintah. Jurnal Administrasi Publik, 14(2), 88–101.

Hartarto, A. (2024). Evaluasi program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah melalui bantuan modal usaha. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 45–58.

Haryati, S., Nugroho, R., & Prasetyo, D. (2026). Pendampingan pemerintah dalam meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan UMKM. Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, 11(2), 125–139.

Meijer, A., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). Open government: Connecting vision and voice. International Review of Administrative Sciences, 78(1), 10–29.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.

Nabila, R. (2021). Efektivitas program bantuan modal usaha terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 19(2), 85–97.

Novandi, D. R., Yudeline, M. H., & Diryana, I. (2019). Creating MSMEs governance indicators as evaluation tools and reference in creating good corporate governance. Journal of Business and Finance in Emerging Markets, 1(2), 205–216.

Patton, M. Q. (2015). Qualitative research and evaluation methods (4th ed.). Sage Publications.

Putra, A., Yuliana, N., & Sari, D. (2021). Evaluasi implementasi program bantuan usaha mikro kecil dan menengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Administrasi Negara, 27(3), 211–226.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). Evaluation theory, models, and applications. Jossey-Bass.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.

Winarno, B. (2016). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus. Yogyakarta: CAPS.